

SKRIPSI

PENGARUH FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL TERHADAP INFLASI DI INDONESIA TAHUN 2005-2018

disusun dan diajukan oleh
TALITA MARIA WALUJAN
A11115324



**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**



Optimization Software:
www.balesio.com

SKRIPSI

PENGARUH FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL TERHADAP INFLASI DI INDONESIA TAHUN 2005-2018

Sebagai salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh
TALITA MARIA WALUJAN
A11115324



DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020



SKRIPSI

**PENGARUH FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL
TERHADAP INFLASI DI INDONESIA TAHUN 2005-2018**

disusun dan diajukan oleh

**TALITA MARIA WALUJAN
A11115324**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 9 Oktober 2020

Pembimbing I



Dr. Sanusi Fattah, SE., M.Si
NIP. 19690413 199403 1 003

Pembimbing II



Dr. Sabir, SE., M.Si
NIP. 19740715 200212 1 003

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Sanusi Fattah, SE., M.Si
NIP. 19690413 199403 1 003



SKRIPSI

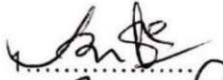




PENGARUH FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL TERHADAP INFLASI DI INDONESIA TAHUN 2005-2018

disusun dan diajukan oleh

TALITA MARIA WALUJAN
A11115324

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal 2 November 2020 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Sanusi Fattah, SE., M.Si	Ketua	
2.	Dr. Sabir, SE., M.Si.	Sekretaris	
3.	Dr. Indraswati T. A. Reviane, SE., MA.	Anggota	
4.	Dr. Hamrullah, SE., M.Si.	Anggota	
5.	Dr. Amanus Khalifah Fil'ardy Yunus, SE., M.Si.	Anggota	

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Sanusi Fattah, SE., M.Si
NIP. 19690413 199403 1 003



PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TALITA MARIA WALUJAN
NIM : A11115324
Jurusan / Program Studi : ILMU EKONOMI / STRATA SATU (S1)

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul :

PENGARUH FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL TERHADAP INFLASI DI INDONESIA TAHUN 2005-2018

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 5 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 13 Oktober 2020

Yang membuat pernyataan



Talita Maria Walujan



PRAKATA

Segala Puji dan syukur bagi Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena anugerah, kemurahan dan kasih setia-Nya yang besar sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar. Adapun judul dari skripsi ini adalah **“Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal terhadap Inflasi di Indonesia tahun 2005-2018”**.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak akan bisa selesai jika tidak didukung oleh banyak pihak. Maka dari itu izinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih lewat prakata ini.

Terima kasih kepada kedua orang tua penulis, yaitu Papa Jaffry August Waluyan dan Mama Marlin Naray yang dengan penuh kesabaran dan kasih sayang telah mendidik, membesarkan, mendoakan, mendukung dan berjuang demi penulis. Bila penulis bisa tumbuh dan berkembang bahkan hingga tahap penyelesaian skripsi ini, itu semua berasal dari akar keluarga yang kuat yaitu Mama dan Papa. Tentunya semua ini penulis persembahkan terutama untuk mereka. Kiranya berkat dan penyertaan Tuhan selalu menjadi bagian hidup mama dan papa.

Terima kasih kepada adik penulis satu-satunya, Mozad Timothy Waluyan yang selalu mendukung dan mendampingi selama proses penyelesaian skripsi ini. Penulis tidak akan bisa mencapai semua ini jika bukan karena peran penting beliau. Begitupun bagi seluruh keluarga besar Waluyan-Naray, terkhusus Alm Opa Hildebrand Robert Naray, Oma Marie Josephine Hosang dan adik-adik sepupu (Kel, Eca, Putri, Leo, Geral, Xelo dan Nicole). Doa, nasihat dan dukungan



dari mereka selalu menjadi semangat bagi penulis untuk terus berjuang agar skripsi ini boleh selesai. Untuk itu penulis berharap pencapaian ini bisa menjadi kebanggaan sekaligus motivasi khususnya bagi adik-adik agar terus berjuang meraih mimpi dan menyelesaikan studi. Kiranya Tuhan senantiasa menganugrahkan kesehatan dan kekuatan serta mempersatukan kita terus.

Terima kasih penulis ucapkan kepada Dr. Sabir, SE., M.Si selaku Penasehat Akademik dan Pembimbing II penulis atas kesediaan waktu dan keikhlasan memberikan arahan, nasehat, bimbingan, dan bantuan dari awal hingga akhir masa studi penulis. Semoga Tuhan senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, dan rezeki kepada beliau. Selanjutnya, ucapan terima kasih penulis sampaikan pula kepada :

- Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya
- Prof. Dr. Abdul Rahman Kadir, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis beserta jajarannya
- Dr. Sanusi Fattah, S.E., M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Ekonomi sekaligus Pembimbing I penulis dan Dr. Nur Dwiana Sari Saudi, SE., M.Si selaku Sekertaris Departemen Ilmu Ekonomi. Terima kasih atas segala bantuan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Departemen Ilmu Ekonomi.
- Dr. Indraswati T.A. Reviane, SE., MA., Dr. Hamrullah, SE., M.Si., dan Dr. Amanus Khalifah Fil'ardy Yunus, SE., M.Si., selaku penguji. Terima kasih atas segala arahan, dukungan, dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.



- Kepada seluruh teman-teman ANTARES 2015 atas segala perhatian, bantuan dan dukungan yang telah diberikan. Kiranya kita bisa terus menjaga ikatan ini agar tetap solid.
- Kepada seluruh teman-teman PMKO FE-UH yang telah kebersamai dan mendampingi penulis dari awal masuk kuliah hingga sekarang. Terima kasih atas segala doa dan dukungan yang selalu diberikan. Terima kasih untuk Kak Yul, Dian, Oi, Mery, dan Ratu yang selalu menyemangati, membantu dan menemani terutama urusan kampung tengah. Terima kasih untuk Kak Icha dan teman-teman lain yang menemani selama proses penyelesaian skripsi ini. Terima kasih untuk setiap cerita dan pengalaman yang dibagikan, serta hal-hal menyenangkan yang boleh dilakukan selama waktu senggang. Kiranya kita senantiasa dipersatukan dalam iman, harap dan kasih kepada Tuhan.
- Kepada Hildayana dan Nur Rahmawati Sri Wulandari yang juga berperan besar dalam penulisan skripsi ini hingga selesai. Terima kasih karena tidak pernah lelah membantu, mengingatkan, mendukung dan mendoakan.
- Kepada teman-teman seperjuangan bureng109 selain Hilda, yang telah menemani semenjak menjadi mahasiswa hingga sekarang yaitu Maudy dan Dewi. Semangat menyelesaikan tugas akhirnya.
- Kepada sahabat-sahabat selama SMA, The Blink Ring; Indri, Babas, Nanda dan Nining, juga teman-teman band Suddenly Project; Avud, Kiki, Kevin, Binna yang walau dipisahkan jarak namun tetap setia mengingatkan, mendukung dan mendoakan.
- Kepada Yeremia Dwi Hendryanto yang tidak pernah lelah mengingatkan penulis untuk sadar akan kewajiban dan tanggung jawab menyelesaikan studi.

ah karena beliau, penulis akhirnya berani mengambil langkah dan gajukan judul. Seluruh proses yang penulis lewati hingga bisa sampai



pada tahap akhir penyelesaian skripsi ini tidak pernah terlepas dari pendampingan, bantuan, kepercayaan, dukungan, dan doa dari beliau. Kiranya Tuhan selalu memberkati dalam kehidupan dan masa depan.

- Kepada semua pihak yang mungkin tidak disebutkan diatas namun telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Tuhan selalu memberkati dan menyertai seluruh kehidupannya.

Akhir kata, semoga ilmu pengetahuan pada skripsi ini tidak hanya sekedar persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana tetapi juga mampu menghantarkan manfaat kepada pembaca meskipun penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan, sehingga kritik dan saran yang membangun dibutuhkan untuk menyempurnakan skripsi ini.

Makassar, 23 Oktober 2020

Penulis



ABSTRAK

PENGARUH FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL TERHADAP INFLASI DI INDONESIA TAHUN 2005-2018

Talita Maria Walujan
Sanusi Fattah Sabir

Inflasi merupakan indikator penting yang digunakan sebagai tolak ukur stabilitas ekonomi suatu negara. Inflasi harus senantiasa dijaga agar tetap terkendali sehingga tidak berdampak buruk bagi perekonomian. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui pengaruh faktor internal yaitu jumlah uang beredar, nilai tukar, BI Rate dan belanja pemerintah, serta faktor eksternal yaitu harga minyak dunia terhadap inflasi di Indonesia tahun 2005-2018. Penelitian ini menggunakan metode analisis Ordinary Least Square (OLS) untuk mengestimasi pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel jumlah uang beredar berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi. Variabel nilai tukar berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi. Variabel BI Rate berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap inflasi. Variabel belanja pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap inflasi. Variabel harga minyak dunia berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi.

Kata kunci : inflasi, jumlah uang beredar, nilai tukar, bi rate, belanja pemerintah, harga minyak dunia.



ABSTRACT

THE EFFECT OF INTERNAL AND EXTERNAL FACTOR ON INFLATION IN INDONESIA IN 2005-2018

Talita Maria Walujan
Sanusi Fattah Sabir

Inflation is an important indicator used as a measure of a country's economic stability. Inflation must always be maintained so that it does not give bad impact on the economy. The purpose of this study is to determine the effect of internal factor such as money supply, exchange rate, BI rate, government expenditure, and external factor which is world oil prices on inflation in Indonesia in 2005-2018. This study uses the Ordinary Least Square (OLS) analysis method to estimate the effect of the independent and dependent variables. The results showed that the money supply variable has a positive and significant effect on inflation. The exchange rate variable has a positive and significant effect on inflation. The BI rate variable has a positive and insignificant effect in inflation. The government expenditure variable has a negative and significant effect on inflation. The world oil price variable has a positive and significant effect on inflation.

Keywords : Inflation, money supply, exchange rate, bi rate, government expenditure, world oil price.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR GRAFIK	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	9
2.1. Tinjauan Teoritis.....	9
2.1.1. Konsep Inflasi.....	9
2.1.2. Konsep Jumlah Uang Beredar.....	13
2.1.3. Konsep Nilai Tukar	15
2.1.4. Konsep BI Rate	17
2.1.5. Konsep Belanja Pemerintah	19
2.1.6. Konsep Harga Minyak Dunia	21
2.2. Hubungan Teori Antar Variabel	22
2.2.2 Nilai Tukar terhadap Inflasi	24
2.2.3 BI Rate terhadap Inflasi	25
2.2.4 Belanja Pemerintah terhadap Inflasi	27
2.2.5 Harga Minyak Dunia terhadap Inflasi	30
2.3. Penelitian Terdahulu.....	32



2.3.	Kerangka Konseptual	37
2.4.	Hipotesis.....	39
BAB III METODE PENELITIAN.....		40
3.1.	Ruang Lingkup	40
3.2.	Jenis dan Sumber Data	40
3.3.	Metode Analisis dan Pengolahan Data	40
3.4.	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		45
4.1	Perkembangan Variabel Penelitian.....	45
4.1.1	Perkembangan Inflasi.....	45
4.1.2	Perkembangan Jumlah Uang Beredar	51
4.1.3	Perkembangan Nilai Tukar	53
4.1.4	Perkembangan BI Rate	58
4.1.5	Perkembangan Belanja Pemerintah	60
4.1.6	Perkembangan Harga Minyak Dunia	62
4.2	Hasil dan Pembahasan.....	64
3.4.1.	Pengaruh Jumlah Uang Beredar (X2) terhadap Inflasi (Y)	66
3.4.2.	Pengaruh Nilai Tukar (X3) terhadap Inflasi (Y)	69
3.4.3.	Pengaruh BI Rate (X4) terhadap Inflasi (Y).....	72
3.4.4.	Pengaruh Belanja Pemerintah (X5) terhadap Inflasi (Y).....	74
3.4.5.	Pengaruh Harga Minyak Dunia (X6) terhadap Inflasi (Y)	75
BAB V PENUTUP		78
4.1.	Kesimpulan.....	78
4.2.	Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....		81
LAMPIRAN.....		84



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Perbandingan Inflasi Target dan Inflasi Aktual Tahun 2001-2018.....	2
Tabel 4. 1 Total Pengeluaran Pemerintah Pusat (miliar rupiah)	61
Tabel 4. 2 Hasil Estimasi	64



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual.....	39
--------------------------------------	----



DAFTAR GRAFIK

Grafik 4. 1 Perkembangan Inflasi di Indonesia	46
Grafik 4. 2 Perkembangan Jumlah Uang Beredar (M2) Milliar Rupiah	51
Grafik 4. 3 Harga Minyak Dunia (US dollar/barrel)	63



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.....	84
Lampiran 2.....	85
Lampiran 3.....	86



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Stabilitas ekonomi suatu negara diantaranya tercermin dari adanya stabilitas harga. Hal ini akan terwujud apabila tidak terdapat gejolak harga yang besar yang dapat merugikan masyarakat, baik konsumen maupun produsen. Karena itu, pengendalian inflasi merupakan salah satu masalah utama makroekonomi. Inflasi merupakan salah satu indikator yang menentukan baik tidaknya perekonomian suatu negara. Jika terjadi gejolak sosial, politik dan ekonomi di dalam maupun di luar negeri maka akan selalu dikaitkan dengan masalah inflasi (Sutawijaya dan Zulfahi, 2012).

Inflasi merupakan fenomena ekonomi yang selalu menarik dibahas terutama berkaitan dengan dampaknya yang luas terhadap perekonomian. Dampak yang dihasilkan bisa positif atau negatif tergantung parah atau tidaknya inflasi. Maka dari itu, setiap negara selalu berusaha menjaga agar inflasi tetap berada di posisi stabil. Sebagaimana yang dikemukakan Deviana (2014), jika inflasi tidak dapat dikendalikan atau terjadi hiperinflasi, keadaan perekonomian akan menjadi kacau dan lesu. Orang tidak bersemangat kerja, menabung, atau mengadakan investasi dan produksi karena harga meningkat dengan cepat.

Inflasi cenderung terjadi pada negara-negara berkembang, seperti halnya Indonesia. Langi dkk (2014) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Pengaruh Suku Bunga BI, Jumlah Uang Beredar, dan Tingkat Kurs terhadap Tingkat Inflasi di Indonesia mengatakan bahwa negara berkembang umumnya memiliki struktur

perekonomian yang masih bercorak agraris sehingga cenderung rentan dengan guncangan terhadap kestabilan kegiatan perekonomian. Menurut Kalalo



dkk (2016), naik turunnya inflasi cenderung mengakibatkan terjadinya gejala ekonomi karena inflasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, neraca perdagangan internasional, nilai utang piutang antar negara, tingkat bunga, tabungan domestik, pengangguran, dan kesejahteraan masyarakat.

Inflasi di Indonesia sangat “sensitif” dan mudah sekali naik. Jika tingkat inflasi menembus level 2 digit, maka seperti yang dikatakan di atas, akan sangat berpengaruh terhadap sektor-sektor yang mendukung perekonomian. Untuk itu, pemerintah dan otoritas moneter dalam hal ini Bank Indonesia, senantiasa berusaha menekan tingkat inflasi.

Tabel 1. 1 Perbandingan Inflasi Target dan Inflasi Aktual Tahun 2001-2018

Year	Inflation Target	Inflation Actual (% , yoy)
2005	6 ±1%	17,11
2006	8 ±1%	6,6
2007	6 ±1%	6,59
2008	5 ±1%	11,06
2009	4,5 ±1%	2,78
2010	5±1%	6,96
2011	5±1%	3,79
2012	4.5±1%	4,3
2013	4.5±1%	8,38
2014	4.5±1%	8,36
2015	4±1%	3,35
2016	4±1%	3,02
2017*	4±1%	
2018*	3,5±1%	

Sumber : *Bank Indonesia*

Dari Tabel 1.1 dapat dilihat inflasi Indonesia dalam tiga belas tahun terakhir

kuatif. Diawali pada tahun 2005 inflasi berada pada posisi yang cukup atinkan yaitu 17,1% yang terutama dipengaruhi oleh kuatnya pengaruh



faktor eksternal. Pada tahun 2006 inflasi jauh membaik bahkan berada di bawah target yaitu turun menjadi 6,6%. Tahun 2007 inflasi jauh lebih stabil yaitu berada pada angka 6,6%. Namun setelah itu, di tahun 2008 inflasi melesat naik cukup tinggi mencapai dua digit yaitu sebesar 11,06% dan kemudian turun drastis di tahun 2009 yaitu mencapai 2,78%. Setelah itu tahun 2010 kembali naik cukup tinggi di angka 6,96%, lalu turun lagi di tahun 2011 yaitu 3,79% dan naik sedikit di tahun 2012 yaitu 4,3%. Di tahun 2013 dan 2014 inflasi kembali naik di angka 8,38 dan 8,36%.

Berdasarkan data dari Tabel 1.1, inflasi di Indonesia hingga tahun 2018 sebenarnya cukup terkendali. Jika dilihat, tidak banyak inflasi aktual yang meleset dari target yang ditentukan. Namun jika dicermati, terdapat 4 tahun dimana inflasi aktual melebihi target yang ditetapkan. Jika dikonversikan dalam bentuk persen, selama 13 tahun ternyata masih ada 30,76% inflasi yang meleset dari target. Hal ini cukup menjadi masalah mengingat angkanya masih tergolong besar sehingga perlu diteliti lebih lanjut.

Inflasi di Indonesia dapat dipengaruhi oleh faktor dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal). Faktor dapat berupa penerapan kebijakan fiskal dan moneter. Faktor eksternal tentu berasal dari kondisi-kondisi ekonomi yang terjadi secara global. Indonesia tidak terlepas dari pengaruh luar sebab Indonesia merupakan negara *small open economy*. Adapun *small open economy* merupakan karakteristik suatu negara yang merupakan bagian kecil dari pasar dunia, sehingga pengaruhnya terhadap pasar dunia juga kecil. Konsekuensi yang ditimbulkan sebagai negara *small open economy* adalah stabilitas perekonomian domestik akan rawan terhadap guncangan yang ditimbulkan oleh perekonomian dunia.



Kebijakan yang dapat dilakukan untuk mengendalikan inflasi secara internal adalah kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter dilakukan oleh pihak otoritas moneter untuk mempengaruhi variabel moneter yaitu diantaranya jumlah uang beredar, nilai tukar dan suku bunga. Menurut UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Sentral, Bank Indonesia memiliki fokus pada pencapaian dan pemeliharaan nilai mata uang rupiah yang salah satunya tercermin dari inflasi. Kemudian, menurut UU No. 3 tahun 2004, inflasi merupakan satu-satunya tujuan kebijakan moneter di Indonesia. Setelah adanya krisis 1998, otoritas moneter mulai memikirkan strategi kebijakan dalam rangka pengendalian moneter untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu yang telah ditetapkan.

Kebijakan fiskal dibuat oleh pemerintah agar perekonomian negara dapat dikendalikan melalui pengeluaran dan pendapatan yang berupa pajak pemerintah. Melalui kebijakan fiskal, pemerintah dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional, kesempatan kerja, investasi nasional, dan distribusi penghasilan nasional.

Hingga saat ini, upaya untuk meningkatkan perekonomian Indonesia masih terkendala karena harga masih bersifat fluktuatif sehingga dapat menimbulkan inflasi. Jika suatu negara ingin mempertahankan laju inflasi yang rendah, tentunya pemerintah harus menekan kenaikan harga. Usaha untuk menekan harga ini dapat dilakukan salah satunya dengan menekan laju kenaikan jumlah uang beredar.

Uang mempunyai peran sentral di dalam perekonomian modern. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Tambunan (2011), uang yang beredar dalam masyarakat terlalu banyak maka akan menimbulkan banyak permintaan, dan sebaliknya jika uang yang dipegang oleh masyarakat terlalu sedikit mengakibatkan

pernyataan permintaan dalam masyarakat yang mengakibatkan rendahnya produksi sehingga bisa menimbulkan resesi ekonomi.



Jumlah uang beredar adalah salah satu variabel moneter yang mempengaruhi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan mendorong peningkatan permintaan uang. Jumlah uang beredar di Indonesia terus mengalami peningkatan. Melihat fakta ini, maka stabilitas uang yang beredar perlu dijaga karena berdampak pada stabilitas ekonomi.

Dalam perekonomian terbuka, kestabilan tingkat harga dapat dilihat dari nilai tukar suatu mata uang. Tinggi rendahnya nilai tukar suatu mata uang dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran terhadap mata uang tersebut. Ketika nilai rupiah meningkat cukup tinggi mengakibatkan melambungnya harga barang-barang terutama barang-barang impor atau bahan baku industri yang masih belum dapat diproduksi di dalam negeri. Situasi demikian menyebabkan meningkatnya laju inflasi, dan apabila situasi ini terjadi terus-menerus dan semakin hari harga barang terus meningkat, maka akan menyebabkan laju inflasi yang cukup tinggi dari tahun-tahun sebelumnya.

Fluktuasi tingkat suku bunga juga mempunyai implikasi yang penting terhadap sektor riil maupun sektor moneter dalam perekonomian. Tingkat bunga yang tinggi akan menjadi masalah yang menyulitkan bagi investasi di sektor riil. Tapi tingkat bunga yang tinggi akan merangsang lebih banyak tabungan masyarakat. Untuk itulah tingkat fluktuasi bunga harus senantiasa terkontrol agar tetap mendorong kegiatan investasi dan produksi serta tidak mengurangi hasrat masyarakat untuk menabung dan tidak mengakibatkan pelarian modal ke luar negeri (Mahendra, 2016).

Cara lain untuk mengendalikan inflasi adalah melalui belanja pemerintah. Belanja pemerintah sendiri dilakukan dengan menggunakan uang dan sumberdaya

negara untuk membiayai suatu kegiatan negara atau pemerintah untuk menjalankan fungsinya dalam melakukan kesejahteraan.



Belanja pemerintah seluruh kabupaten/kota di Indonesia terus meningkat dari tahun 2005 hingga tahun 2018. Melihat fakta ini, pemerintah harus bertindak mengontrol pengeluaran karena jika pengeluaran terus meningkat akan berdampak pada inflasi melalui permintaan terhadap barang dan jasa.

Faktor eksternal yang mempengaruhi inflasi suatu negara salah satunya adalah harga minyak dunia. Arifin (2016) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Harga Minyak Dunia, Nilai Tukar dan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, mengatakan bahwa minyak merupakan salah satu sumber energi strategis yang menjamin perkembangan industri modern dan ekonomi. Harga minyak selalu dianggap sebagai barometer ekonomi di seluruh dunia, karena minyak merupakan salah satu energi utama yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung dalam memproduksi barang dan jasa. Minyak menjadi sumber energi terbatas yang digunakan untuk menopang proses produksi dibandingkan dengan sumber energi lainnya.

Fluktuasi harga minyak yang sangat tinggi menjadi perhatian hampir seluruh negara di dunia, baik negara produsen (eksportir) minyak bumi maupun konsumen (importir). Pasokan minyak bumi merupakan *input* vital dalam proses produksi industri, terutama untuk menghasilkan listrik, menjalankan mesin produksi dan mengangkut hasil produksi ke pasar. Jika harga minyak mentah dunia meningkat, maka harga BBM dalam negeri pun ikut meningkat sehingga akhirnya akan menimbulkan peningkatan inflasi.

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwasanya inflasi sudah menjadi masalah perekonomian di Indonesia sejak lama dimana fenomena inflasi ini sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang berkaitan dengan kondisi. Sehingga

bertarik meneliti mengenai masalah inflasi di Indonesia dengan judul



“Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal terhadap Inflasi di Indonesia tahun 2005 - 2018”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah apakah faktor internal yaitu jumlah uang beredar, nilai tukar, dan BI Rate, belanja pemerintah, serta faktor eksternal yaitu harga minyak dunia berpengaruh terhadap inflasi di Indonesia tahun 2005-2018?

1.3. Tujuan Penelitian

Mengacu pada masalah yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh faktor internal yaitu jumlah uang beredar, nilai tukar, BI Rate, belanja pemerintah, serta faktor eksternal harga minyak dunia terhadap inflasi di Indonesia tahun 2005-2018.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini dibuat dengan harapan akan memberikan manfaat bagi beberapa pihak yaitu :

1. Penulis dan pembaca, agar menambah pengetahuan dan wawasan mengenai inflasi secara umum, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya baik dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal).
2. Akademik, agar dapat dijadikan referensi atau literatur selanjutnya dengan pokok bahasan yang sama, yaitu mengenai inflasi



3. Pemerintah, otoritas moneter, atau stakeholder terkait, sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan mengenai inflasi.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Tinjauan Teoritis

2.1.1. Konsep Inflasi

Terdapat banyak pengertian inflasi dalam ruang lingkup ilmu ekonomi. Keanekaragaman pengertian ini disebabkan oleh pengaruh inflasi terhadap berbagai sektor perekonomian. Menurut Mankiw (2006) inflasi merupakan peningkatan dalam seluruh tingkat harga. Kemudian, Boediono (2009) mendefinisikan inflasi sebagai kecenderungan dari harga yang naik secara umum dan terus menerus. Sementara itu, menurut Case dan Fair (2007), inflasi diartikan sebagai kenaikan jumlah uang beredar atau kenaikan likuiditas dalam suatu perekonomian.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut terdapat aspek-aspek yang perlu digarisbawahi, yaitu : (1) *Tendency* atau kecenderungan harga-harga untuk meningkat, artinya dalam suatu waktu tertentu dimungkinkan terjadinya penurunan harga, tetapi menunjukkan kecenderungan untuk meningkat; (2) *Sustained*. Peningkatan harga tersebut tidak hanya terjadi pada waktu tertentu atau sekali waktu saja, melainkan secara terus menerus dan dalam jangka waktu yang lama; (3) *General Level of Prices*. Tingkat harga yang dimaksud adalah tingkat harga barang-barang secara umum sehingga tidak hanya satu macam barang saja.

Selain Inflasi (*Inflation*), perlu juga dipahami Tingkat Inflasi (*Inflation Rate*) dan Indeks Harga (*Price Index*). Jika inflasi adalah tingkat perubahan harga itu

haka tingkat inflasi adalah akumulasi dari inflasi terdahulu atau persentase
n dalam tingkat harga, sedangkan Indeks Harga mengukur biaya dari



sekelompok barang tertentu sebagai persentasi dari kelompok yang sama pada periode dasar (*base period*).

Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Penentuan barang dan jasa dalam keranjang IHK dilakukan atas dasar Survei Biaya Hidup (SBH) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Kemudian, BPS akan memonitor perkembangan harga dari barang dan jasa tersebut secara bulanan di beberapa kota, di pasar tradisional dan modern terhadap beberapa jenis barang/jasa di setiap kota.

Inflasi yang diukur dengan IHK di Indonesia dikelompokkan ke dalam 7 kelompok pengeluaran (berdasarkan *the Classification of individual consumption by purpose* - COICOP), yaitu : (1) Kelompok Bahan Makanan; (2) Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau; (3) Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar; (4) Kelompok Sandang; (5) Kelompok Kesehatan; Kelompok Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga; (6) Kelompok Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan.

Disamping pengelompokan berdasarkan COICOP tersebut, BPS saat ini juga mempublikasikan inflasi berdasarkan pengelompokan yang lainnya yang dinamakan disagregasi inflasi. Disagregasi inflasi tersebut dilakukan untuk menghasilkan suatu indikator inflasi yang lebih menggambarkan pengaruh dari faktor yang bersifat fundamental. Di Indonesia, disagregasi inflasi IHK tersebut dikelompokkan menjadi Inflasi Inti dan Inflasi non inti. Inflasi inti adalah komponen inflasi yang cenderung menetap atau persisten (*persistent component*) di dalam

an inflasi dan dipengaruhi oleh faktor fundamental, seperti : interaksi an-penawaran, lingkungan eksternal (nilai tukar, harga komoditi



internasional, inflasi mitra dagang), dan ekspektasi Inflasi dari pedagang dan konsumen. Inflasi non Inti adalah komponen inflasi yang cenderung tinggi volatilitasnya karena dipengaruhi oleh selain faktor fundamental.

Komponen inflasi non inti terdiri dari : (1) Inflasi Komponen Bergejolak (*Volatile Food*), yaitu dominan dipengaruhi oleh shocks (kejutan) dalam kelompok bahan makanan seperti panen, gangguan alam, atau faktor perkembangan harga komoditas pangan domestik maupun perkembangan harga komoditas pangan internasional; (2) Inflasi Komponen Harga yang diatur Pemerintah (*Administered Prices*), yaitu Inflasi yang dominan dipengaruhi oleh *shocks* (kejutan) berupa kebijakan harga Pemerintah, seperti harga BBM bersubsidi, tarif listrik, tarif angkutan, dan lain lain.

Inflasi timbul karena adanya tekanan dari sisi *supply (cost push inflation)*, dari sisi permintaan (*demand pull inflation*), dan dari ekspektasi inflasi. Faktor-faktor terjadinya *cost push inflation* dapat disebabkan oleh depresiasi nilai tukar, dampak inflasi luar negeri terutama negara-negara partner dagang, peningkatan harga-harga komoditi yang diatur pemerintah (*administered price*), dan terjadi *negative supply shocks* akibat bencana alam dan terganggunya distribusi. Faktor-faktor ini berasal dari dalam negeri (internal).

Faktor penyebab terjadi *demand pull inflation* adalah tingginya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Dalam konteks makroekonomi, kondisi ini digambarkan oleh output riil yang melebihi output potensialnya atau permintaan total (*aggregate demand*) lebih besar dari pada kapasitas perekonomian. Sementara itu, faktor ekspektasi inflasi dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi dalam menggunakan ekspektasi angka inflasi dalam keputusan

ekonominya. Ekspektasi inflasi tersebut apakah lebih cenderung bersifat atau *forward looking*. Hal ini tercermin dari perilaku



pembentukan harga di tingkat produsen dan pedagang terutama pada saat menjelang hari-hari besar keagamaan (lebaran, natal, dan tahun baru) dan penentuan upah minimum provinsi (UMP). Meskipun ketersediaan barang secara umum diperkirakan mencukupi dalam mendukung kenaikan permintaan, namun harga barang dan jasa pada saat-saat hari raya keagamaan meningkat lebih tinggi dari kondisi *supply-demand* tersebut. Demikian halnya pada saat penentuan UMP, pedagang ikut pula meningkatkan harga barang meski kenaikan upah tersebut tidak terlalu signifikan dalam mendorong peningkatan permintaan.

Terdapat tiga kelompok teori mengenai inflasi yang membahas tentang aspek-aspek tertentu, tiga teori tersebut yaitu Teori Kuantitas, Teori Keynes, dan Teori Strukturalis. Dalam teori kuantitas, inflasi hanya biasa terjadi jika ada penambahan volume jumlah uang beredar, baik uang kartal maupun uang giral, dan harapan masyarakat mengenai kenaikan harga-harga. Bila terjadi kegagalan panen misalnya, yang menyebabkan harga beras naik, tetapi apabila jumlah uang beredar tidak ditambah, maka kenaikan harga beras akan berhenti dengan sendirinya.

Pada teori Keynes, terdapat kelompok sosial yang cenderung menginginkan bagian yang lebih besar daripada yang dapat disediakan oleh masyarakat (*inflationary gap*). Kelompok-kelompok sosial ini misalnya orang-orang pemerintah sendiri, pihak swasta atau bisa juga serikat buruh yang berusaha mendapatkan kenaikan gaji atau upah. Hal ini akan berdampak terhadap permintaan barang dan jasa yang pada akibatnya akan menaikkan harga. Proses inflasi akan terus berlanjut selama jumlah permintaan efektif dari masyarakat melebihi jumlah output yang bisa dihasilkan. Inflasi ini akan berhenti jika permintaan efektif tidak melebihi harga-harga yang berlaku.



Selanjutnya teori strukturalis atau yang biasa disebut dengan teori inflasi jangka panjang menyoroti sebab-sebab inflasi yang berasal dari kekakuan struktur ekonomi. Karena struktur pertumbuhan produksi barang-barang ini terlalu lambat dibandingkan dengan pertumbuhan kebutuhan masyarakat, akibatnya penawaran barang kurang dari yang dibutuhkan masyarakat, sehingga harga barang dan jasa meningkat.

Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pertama, inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus turun sehingga standar hidup dari masyarakat turun dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin, bertambah miskin. Kedua, inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian (*uncertainty*) bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi, yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Ketiga, tingkat inflasi domestik yang lebih tinggi dibanding dengan tingkat inflasi di negara tetangga menjadikan tingkat bunga domestik riil menjadi tidak kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai rupiah.

2.1.2. Konsep Jumlah Uang Beredar

Pengertian uang beredar seperti yang dikutip dalam bi.go.id adalah jumlah uang yang beredar dalam sistem moneter (Bank Sentral, Bank Umum, dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) terhadap sektor swasta domestik (tidak termasuk pemerintah pusat



dan bukan penduduk). Kewajiban yang menjadi komponen Uang Beredar terdiri dari uang kartal yang dipegang masyarakat (di luar Bank Umum dan BPR), uang giral, uang kuasi yang dimiliki oleh sektor swasta domestik, dan surat berharga selain saham yang diterbitkan oleh sistem moneter yang dimiliki sektor swasta domestik dengan sisa jangka waktu sampai dengan satu tahun.

Uang Beredar dapat didefinisikan dalam arti sempit dan dalam arti luas. M1 atau biasa disebut dengan *narrow money* meliputi uang kartal (uang kertas dan uang logam) yang dipegang masyarakat dan uang giral (giro berdenominasi Rupiah atau demand deposit (DD)). M2 atau biasa disebut *board money* meliputi M1, uang kuasi (mencakup tabungan, simpanan berjangka dalam rupiah dan valas, serta giro dalam valuta asing), dan surat berharga atau *time deposit* (TD) atau *saving deposit* (SD) yang diterbitkan oleh sistem moneter yang dimiliki sektor swasta domestik dengan sisa jangka waktu sampai dengan satu tahun. Definisi uang beredar lebih luas lagi disimbolkan dengan M3, yang mencakup SD dan TD, mata uang domestik atau mata uang asing penduduk negara yang bersangkutan yang terdapat pada lembaga-lembaga keuangan. Semua TD dan SD ini disebut uang kuasi atau *quasy money* (QM). TD dan SD dalam mata uang asing yang bukan merupakan milik penduduk yang bersangkutan tidak termasuk dalam definisi uang kuasi.

Melanjutkan yang dikutip bi.go.id, faktor yang mempengaruhi Uang Beredar adalah Aktiva Luar Negeri Bersih (Net Foreign Assets / NFA) dan Aktiva Dalam Negeri Bersih (Net Domestic Assets / NDA). Aktiva Dalam Negeri Bersih antara lain terdiri dari Tagihan Bersih Kepada Pemerintah Pusat (Net Claims on Central Government / NCG) dan Tagihan kepada sektor lainnya (sektor swasta, pemerintah

lembaga keuangan dan perusahaan bukan keuangan) terutama dalam pinjaman yang diberikan.



2.1.3. Konsep Nilai Tukar

Menurut Simorangkir dan Suseno (2004), nilai tukar mata uang atau yang sering disebut dengan kurs adalah harga satu unit mata uang asing dalam mata uang domestik atau dapat juga dikatakan harga mata uang domestik terhadap mata uang asing. Nilai tukar mulai muncul sejak terjadinya transaksi jual beli barang/jasa antar penduduk di negara berbeda yang menggunakan mata uang berbeda pada sistem perekonomian terbuka. Penggunaan mata uang penduduk negara lain dilakukan pada saat penduduk suatu negara melakukan pembelian barang atau jasa dari negara lain. Sementara di sisi negara penjual akan menerima mata uang yang diterima dari negara pembeli tersebut, baik dalam bentuk mata uang negara bersangkutan atau mata uang negara lainnya yang sudah disepakati sebagai mata uang internasional. Perbedaan dan perubahan harga barang yang diperdagangkan dari waktu ke waktu yang dihitung berdasarkan mata uang asing akan menentukan perubahan nilai tukar mata uang antarnegara yang melakukan transaksi perdagangan.

Dalam konsep nilai tukar, dikenal istilah apresiasi dan depresiasi. Apabila nilai tukar didefinisikan sebagai nilai Rupiah dalam valuta asing maka definisinya adalah $NT_{IDR/USD} = \text{Rupiah yang diperlukan untuk membeli 1 dolar Amerika (USD)}$. Dalam hal ini, apabila NT meningkat maka berarti Rupiah mengalami depresiasi, sedangkan apabila NT menurun maka Rupiah mengalami apresiasi. Sementara untuk negara yang menerapkan sistem nilai tukar tetap, perubahan nilai tukar dilakukan secara resmi oleh pemerintah. Kebijakan suatu negara secara resmi menaikkan nilai mata uangnya terhadap mata uang asing disebut dengan revaluasi, sementara kebijakan menurunkan nilai mata uang terhadap mata uang

sebut devaluasi.



Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pengertian tersebut diberikan contoh sebagai berikut. Misalnya, nilai tukar satu dolar Amerika (USD) terhadap mata uang Rupiah sebesar Rp8.500. Apabila nilai tukar satu USD berubah menjadi Rp9.000, maka nilai tukar rupiah mengalami penurunan atau depresiasi. Sebaliknya apabila nilai tukar 1 USD berubah menjadi sebesar Rp8.000, maka nilai tukar rupiah mengalami peningkatan atau apresiasi.

Apabila nilai tukar didefinisikan sebagai nilai valuta asing terhadap Rupiah maka $NT_{USD/IDR} = \text{dolar Amerika yang diperlukan untuk membeli satu Rupiah}$. Dengan menggunakan konsep ini, apabila NT meningkat, maka Rupiah mengalami apresiasi untuk sistem nilai tukar mengambang bebas atau revaluasi untuk sistem nilai tukar tetap, sedangkan apabila NT menurun, maka Rupiah mengalami depresiasi untuk sistem nilai tukar mengambang bebas atau devaluasi untuk sistem nilai tukar tetap.

Dengan contoh di atas, maka dalam pengertian ini, satu Rupiah dinilai sebesar $1/8.500$ USD atau 0,00012 USD. Nilai tukar rupiah mengalami depresiasi jika menurun atau dengan contoh di atas sebesar $1/9000$ USD atau 0,00011, mengalami apresiasi dengan nilai pada contoh $1/8.000$ USD = 0,00013 USD.

Pada dasarnya terdapat tiga sistem nilai tukar, yaitu sistem nilai tukar tetap (*fixed exchange rate*), sistem nilai tukar mengambang (*floating exchange rate*), dan sistem nilai tukar mengambang terkendali (*managed floating exchange rate*). Pada sistem nilai tukar tetap, nilai tukar atau kurs suatu mata uang terhadap mata uang lain ditetapkan pada nilai tertentu, misalnya, nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar Amerika dipatok Rp 8.000,- per dolar. Pada nilai tukar ini bank sentral akan siap untuk menjual atau membeli kebutuhan devisa untuk mempertahankan nilai

ng ditetapkan. Apabila nilai tukar tersebut tidak lagi dapat



dipertahankan, bank sentral dapat melakukan devaluasi ataupun revaluasi atas nilai tukar yang ditetapkan.

Pada sistem nilai tukar mengambang, nilai tukar dibiarkan bergerak sesuai dengan kekuatan permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar. Dengan demikian, nilai tukar akan menguat apabila terjadi kelebihan penawaran valuta asing dan sebaliknya nilai tukar mata uang domestik akan melemah apabila terjadi kelebihan permintaan valuta asing. Bank sentral dapat saja melakukan intervensi di pasar valuta asing, yaitu dengan menjual devisa dalam hal terjadi kekurangan pasokan atau membeli devisa apabila terjadi kelebihan penawaran untuk menghindari gejolak nilai tukar yang berlebihan di pasar. Akan tetapi, intervensi dimaksud tidak diarahkan untuk mencapai target tingkat nilai tukar tertentu atau dalam kisaran tertentu.

Sistem nilai tukar mengambang terkendali merupakan sistem yang berada di antara kedua sistem nilai tukar di atas. Dalam sistem nilai tukar ini, bank sentral menetapkan batasan suatu kisaran tertentu dari pergerakan nilai tukar yang disebut *intervention band* atau *batas pita intervensi*. Nilai tukar akan ditentukan sesuai dengan mekanisme pasar sepanjang berada di dalam batas kisaran pita intervensi tersebut. Apabila nilai tukar menembus batas atas atau batas bawah dari kisaran tersebut, maka bank sentral akan secara otomatis melakukan intervensi di pasar valuta asing sehingga nilai tukar bergerak kembali ke dalam pita intervensi.

2.1.4. Konsep BI Rate

Bunga pada prinsipnya adalah balas jasa yang diberikan oleh pihak yang membutuhkan uang kepada pihak yang memerlukan uang. Bunga dapat dilihat dari sisi penawaran dan sisi permintaan. Dari sisi penawaran, bunga



merupakan pendapatan atas pemberian kredit sehingga pemilik dana akan menggunakan dananya pada jenis investasi yang menjanjikan pembayaran yang tinggi. Sedangkan, bunga dari sisi permintaan merupakan biaya atas pinjaman atau jumlah yang dibayarkan sebagai imbalan atas penggunaan uang yang dipinjam. Bunga merupakan harga yang dibayar atas modal (Deviana, 2014)

Sejak awal Juli 2005, Bank Indonesia menggunakan mekanisme BI rate (sukubunga BI) untuk pelelangan pada masa periode tertentu. BI rate ini kemudian yang digunakan sebagai acuan para pelaku pasar dalam mengikuti pelelangan. Definisi BI rate sendiri menurut Bank Indonesia adalah suku bunga instrumentsinyaling Bank Indonesia yang ditetapkan pada Rapat Dewan Gubernur triwulanan untuk berlaku selama triwulan berjalan, kecuali ditetapkan berbeda oleh Rapat Dewan Gubernur bulanan dalam triwulan yang sama.

BI rate digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan operasi pengendalian moneter untuk mengarahkan agar rata-rata tertimbang suku bunga sertifikat bank indonesia 1 bulan hasil lelang operasi pasar terbuka berada di sekitar BI rate. Selanjutnya suku bunga sertifikat bank indonesia 1 bulan diharapkan mempengaruhi suku bunga pasar uang antar bank dan suku bunga jangka yang lebih panjang. Perubahan BI rate (SBI tenor 1 bulan) ditetapkan secara konsisten dan bertahap dalam kelipatan 25 basis poin. BI rate ditetapkan oleh dewan gubernur dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : (1) Rekomendasi BI rate yang dihasilkan oleh fungsi reaksi kebijakan dalam model ekonomi untuk pencapaian sasaran inflasi; (2) Berbagai informasi lainnya seperti indikator makro ekonomi, survei, pendapat ahli, hasil-hasil riset ekonomi.

Berdasarkan kutipan bi.go.id, Bank Indonesia melakukan penguatan

operasi moneter dengan mengimplementasikan suku bunga acuan atau
 ga kebijakan baru yaitu BI 7-Day (Reverse) Repo Rate, yang berlaku



efektif sejak 19 Agustus 2016, menggantikan BI Rate. Penguatan kerangka operasi moneter ini merupakan hal yang lazim dilakukan di berbagai bank sentral dan merupakan best practice internasional dalam pelaksanaan operasi moneter. Kerangka operasi moneter senantiasa disempurnakan untuk memperkuat efektivitas kebijakan dalam mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan. Instrumen BI 7-day (*Reverse*) *Repo Rate* digunakan sebagai suku bunga kebijakan baru karena dapat secara cepat memengaruhi pasar uang, perbankan dan sektor riil. Instrumen BI 7-Day *Repo Rate* sebagai acuan yang baru memiliki hubungan yang lebih kuat ke suku bunga pasar uang, sifatnya transaksional atau diperdagangkan di pasar, dan mendorong pendalaman pasar keuangan, khususnya penggunaan instrumen repo.

Dengan penggunaan instrumen BI 7-day (*Reverse*) *Repo Rate* sebagai suku bunga kebijakan baru, terdapat tiga dampak utama yang diharapkan. Pertama, menguatnya sinyal kebijakan moneter dengan suku bunga (*Reverse*) *Repo Rate* 7 hari sebagai acuan utama di pasar keuangan. Kedua, meningkatnya efektivitas transmisi kebijakan moneter melalui pengaruhnya pada pergerakan suku bunga pasar uang dan suku bunga perbankan. Ketiga, terbentuknya pasar keuangan yang lebih dalam, khususnya transaksi dan pembentukan struktur suku bunga di pasar uang antarbank (PUAB) untuk tenor 3-12 bulan.

2.1.5. Konsep Belanja Pemerintah

Kebijakan alokasi anggaran belanja negara merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang sangat strategis di antara berbagai pilar kebijakan

nya dalam mencapai sasaran-sasaran pokok pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional



(RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Hal ini terutama karena melalui kebijakan dan alokasi anggaran belanja pemerintah negara, pemerintah dapat secara langsung melakukan intervensi anggaran (*direct budget intervention*) untuk mencapai sasaran-sasaran program pembangunan yang ditetapkan pemerintah.

Pengeluaran atau belanja pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Teori mengenai belanja pemerintah dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu teori makro dan teori mikro. Dalam teori ekonomi makro, belanja pemerintah terdiri dari tiga pos utama yang dapat digolongkan menjadi : a. Belanja pemerintah untuk pembelian barang dan jasa; b. Belanja pemerintah untuk gaji pegawai; c. Belanja pemerintah untuk transfer payment. Transfer payment bukan pembelian barang atau jasa oleh pemerintah di pasar barang melainkan mencatat pembayaran atau pemberian langsung kepada warganya yang meliputi misalnya pembayaran subsidi atau bantuan langsung kepada berbagai golongan masyarakat, pembayaran pensiun, pembayaran bunga untuk pinjaman pemerintah kepada masyarakat. Secara ekonomis transfer payment mempunyai status dan pengaruh yang sama dengan pos gaji pegawai meskipun secara administrasi keduanya berbeda. Sedangkan dalam tinjauan mikro, perkembangan belanja pemerintah adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik.

Interaksi antara permintaan dan penawaran akan barang publik menentukan jumlah barang publik yang akan disediakan melalui anggaran belanja. Jumlah barang publik yang akan disediakan tersebut, selanjutnya akan menimbulkan permintaan akan barang lain. Terkait dengan perkembangan belanja pemerintah, hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu : a. Perubahan permintaan akan barang publik; b. Perubahan dari aktivitas pemerintah dalam



menghasilkan barang publik dan juga perubahan dari kombinasi faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi; c. Perubahan kualitas barang publik; d. Perubahan harga faktor produksi.

2.1.6. Konsep Harga Minyak Dunia

Minyak bumi merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, sementara kebutuhan akan minyak bumi terus meningkat. Hal ini disebabkan karena minyak bumi juga digunakan untuk menopang kebutuhan hidup masyarakat. Terbatasnya ketersediaan minyak bumi menyebabkan kapasitasnya semakin hari semakin berkurang. Jika konsumsi terhadap minyak terus-menerus meningkat tetapi tidak diimbangi dengan ketersediaan minyak yang ada, maka akan terjadilah kelangkaan sumber daya minyak. Dampak yang telah terjadi dari ketidakseimbangan antara produksi dan konsumsi minyak saat ini salah satunya adalah kenaikan harga minyak yang berfluktuatif.

Harga dapat didefinisikan sebagai suatu penetapan nilai pertukaran yang ditetapkan oleh penjual dan pembeli untuk memperoleh suatu produk. Harga minyak dunia adalah harga atau sejumlah nilai moneter yang terbentuk karena permintaan dan penawaran komoditas minyak dunia.

Terdapat tiga jenis minyak yang paling sering diperdagangkan di dunia, yaitu : Minyak *West Texas Intermediate* (WTI) untuk daerah Amerika, Minyak *Brent* untuk daerah Eropa, dan Minyak Dubai untuk kawasan Timur Tengah. Penentuan harga minyak dilihat dari besarnya derajat API (*American Petroleum Institute*) dan kadar belerangnya.

Eluktuasi harga minyak mentah di pasar internasional pada prinsipnya di aksioma yang berlaku umum dalam ekonomi pasar, dimana tingkat yang berlaku sangat ditentukan oleh mekanisme permintaan dan



penawaran (*demand and supply mechanism*) sebagai faktor fundamental. Sedangkan faktor lain yang dianggap sebagai faktor non-fundamental, terutama berkaitan dengan masalah infrastruktur, geopolitik dan spekulasi (Nizar, 2012). Dikutip dari Fauzannissa (2016) harga minyak dunia dipengaruhi oleh tiga faktor. Faktor pertama adalah faktor fundamental, yang terdiri atas permintaan minyak, pasokan minyak, stok minyak, kapasitas produksi cadangan dunia dan kemampuan kilang dunia. Faktor kedua adalah faktor non fundamental, yang terdiri dari geopolitik, kebijakan pemerintah, cuaca, bencana alam, pemogokan, kerusakan instalasi ranai produksi, pelemahan nilai dollar dan spekulasi. Faktor ketiga adalah pengaruh dari kebijaksanaan pasokan OPEC (*Organization of the Petroleum Exporting Countries*).

Kenaikan harga minyak dunia dapat memberikan tambahan penerimaan bagi pemerintah (*windfall profit*). Namun, pada saat bersamaan akan menyebabkan membengkaknya beban subsidi pemerintah. Lebih jauh lagi, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) akan menaikkan biaya produksi yang pada akhirnya mempengaruhi tingkat harga domestik.

2.2. Hubungan Teori Antar Variabel

2.2.1 Jumlah Uang Beredar terhadap Inflasi

Hubungan antara jumlah uang beredar dan inflasi dapat dijelaskan melalui teori kuantitas uang. Teori ini dikemukakan oleh kaum moneteris yang berpendapat bahwa inflasi merupakan fenomena moneter yang terjadi akibat peningkatan jumlah uang beredar. Tingkat harga yang berlaku (P) akan berubah sejalan dengan perubahan uang yang beredar, dengan asumsi bahwa *velocity of money* (V) dan

income (Y) akan dianggap *given* atau *ceteris paribus*



(Mankiw, 2007). Hubungan tersebut dapat ditunjukkan dalam persamaan yang disebut persamaan kuantitas di bawah ini :

$$M \times V = P \times Y$$

Dimana M adalah jumlah uang beredar, V adalah *velocity of money*, P adalah harga dan Y adalah *national income*.

Nilai uang ditentukan oleh *supply* dan *demand* terhadap uang. Jumlah uang beredar ditentukan oleh Bank Sentral, sementara jumlah uang yang diminta (*money demand*) ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain tingkat harga rata-rata dalam perekonomian. Jumlah uang yang diminta oleh masyarakat untuk melakukan transaksi bergantung pada tingkat harga barang dan jasa yang tersedia. Semakin tinggi tingkat harga, semakin besar jumlah uang yang diminta.

Peningkatan harga kemudian mendorong naiknya jumlah uang yang diminta masyarakat. Pada akhirnya, perekonomian akan mencapai ekuilibrium baru, saat jumlah uang yang diminta kembali seimbang dengan jumlah uang yang diedarkan. Penjelasan yang menggambarkan bagaimana tingkat harga ditentukan dan berubah seiring dengan perubahan jumlah uang beredar disebut teori kuantitas uang (*quantity theory of money*). Berdasarkan teori ini, jumlah uang yang beredar dalam suatu perekonomian menentukan nilai uang, sementara pertumbuhan jumlah uang beredar merupakan sebab utama terjadinya inflasi.

Menurut Mankiw (2006), negara – negara yang memiliki pertumbuhan uang yang tinggi cenderung memiliki inflasi yang tinggi sedangkan negara – negara yang memiliki pertumbuhan uang yang rendah cenderung memiliki inflasi yang rendah. Hal tersebut sesuai dengan teori kuantitas bahwa kenaikan dalam tingkat pertumbuhan uang satu persen menyebabkan kenaikan satu persen tingkat inflasi.



2.2.2 Nilai Tukar terhadap Inflasi

Teori yang menerangkan hubungan antara nilai tukar dan tingkat inflasi adalah teori paritas daya beli (*purchasing power parity-PPP*). Teori ini mengatakan bahwa nilai tukar akan berada dalam keseimbangan atau berlaku sesuai dengan yang diharapkan apabila nilai tukar tersebut mencerminkan adanya angka perbandingan antara nilai suatu mata uang dengan nilai mata uang negara lain yang ditentukan oleh daya belinya masing-masing (Atmadjaja, 2013).

Penjelasan konsep teori Purchasing Power Parity didasarkan pada hukum satu harga atau *the law of one price* yang menyatakan bahwa harga komoditas yang sama di dua negara yang berbeda akan sama jika dinilai dengan mata uang yang sama. Hubungan dalam bentuk Paritas Tingkat Bunga biasanya berlaku di negara berkembang, yang mata uangnya tergolong lunak (*soft currency*). Maksudnya adalah mata uang yang cenderung melemah terhadap mata uang lain.

Menurut Madura (2009), keseimbangan nilai tukar akan menyesuaikan dengan besaran perbedaan tingkat inflasi diantara dua negara. Hal ini mengakibatkan daya beli konsumen untuk membeli produk-produk domestik akan sama dengan daya beli mereka untuk membeli produk-produk luar negeri. Dengan kata lain, jika harga meningkat (inflasi) maka mata uang domestik mengalami depresiasi, dengan asumsi bahwa harga di luar negeri (*foreign price*) ceteris paribus. Namun, jika yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu daya beli domestik mengalami kenaikan (harga turun /terjadi deflasi) maka akan diikuti pula oleh apresiasi pada mata uang domestik. Depresiasi berarti harga rupiah terhadap mata uang asing meningkat, sedangkan apresiasi berarti harga rupiah terhadap mata

ng menurun. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat diketahui bahwa
r mempunyai hubungan yang positif terhadap inflasi.



Melemahnya nilai tukar rupiah menjadikan harga barang-barang impor meningkat dikarenakan dibutuhkan jumlah rupiah yang lebih banyak untuk mendapatkan barang-barang impor tersebut, demikian pula halnya dengan barang-barang dengan bahan baku produksi yang diimpor. Hal ini juga akan menaikkan harga produksi dalam negeri yang dapat berujung pada terjadinya inflasi. Depresiasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing juga mengakibatkan meningkatnya nilai ekspor. Harga barang domestik yang lebih murah menarik minat pihak luar negeri untuk menambah jumlah permintaan akan barangnya sehingga perlahan-lahan harga akan naik dan menyebabkan inflasi (Sipayung dan Budhi, 2013).

2.2.3 BI Rate terhadap Inflasi

Teori suku bunga klasik adalah teori yang dapat menjelaskan hubungan antara suku bunga (BI Rate) dan inflasi. Menurut Teori Klasik, teori tingkat suku bunga merupakan teori permintaan penawaran terhadap tabungan dan tingkat suku bunga adalah faktor pengimbang antara permintaan dan penawaran daripada dana investasi yang bersumber dari tabungan. Secara lebih rinci, suku bunga berperan sebagai alat pengukur nilai dalam melakukan transaksi, alat pertukaran untuk memperlancar transaksi barang dan jasa, dan alat penyelesaian hubungan hutang-piutang yang menyangkut masa depan.

Teori ini mengasumsikan bahwa perekonomian senantiasa berada dalam keadaan *full employment*. Dalam keadaan *full employment*, seluruh kapasitas produksi sudah dipergunakan penuh dalam proses produksi. Oleh karena itu, uang tidak dapat mempengaruhi sektor produksi kecuali meningkatkan efisiensi dan mendorong terjadinya spesialisasi pekerjaan.



Konsep tabungan menurut klasik adalah seorang dapat melakukan tiga hal terhadap selisih antara pendapatan dan pengeluaran konsumsinya yaitu: pertama, ditambahkan pada saldo tunai yang ditahannya. Kedua, dibelikan obligasi baru dan ketiga, sebagai pengusaha, dibelikan langsung kepada barang- barang modal. Asumsi yang digunakan disini adalah bahwa penabung yang rasional tidak akan menempuh jalan yang pertama. Berdasarkan pada pertimbangan bahwa akumulasi kekayaan dalam bentuk uang tunai adalah tidak menghasilkan.

Menurut teori klasik, tabungan masyarakat adalah fungsi dari tingkat suku bunga. Makin tinggi tingkat suku bunga makin tinggi pula keinginan masyarakat untuk menabung. Artinya pada tingkat suku bunga yang lebih tinggi masyarakat akan terdorong untuk mengorbankan atau mengurangi pengeluaran untuk konsumsi guna menambah tabungannya. Investasi juga merupakan fungsi dari tingkat suku bunga. Makin tinggi tingkat suku bunga, maka keinginan masyarakat untuk melakukan investasi menjadi semakin kecil. Hal ini karena biaya penggunaan dana (*cost of capital*) menjadi semakin mahal, dan sebaliknya makin rendah tingkat suku bunga, maka keinginan untuk melakukan investasi akan semakin meningkat.

Perubahan berupa peningkatan level BI Rate bertujuan untuk mengurangi laju aktivitas ekonomi yang mampu memicu inflasi. Pada saat level BI Rate naik maka suku bunga kredit dan deposito pun akan mengalami kenaikan. Ketika suku bunga deposito naik, masyarakat akan cenderung menyimpan uangnya di bank dan jumlah uang yang beredar berkurang. Pada suku bunga kredit, kenaikan suku bunga akan merangsang para pelaku usaha untuk mengurangi investasinya karena biaya modal semakin tinggi. Hal demikianlah yang meredam aktivitas ekonomi dan

irinya mengurangi tekanan inflasi.



Sebaliknya, pada saat level BI Rate turun maka suku bunga kredit dan deposito pun akan mengalami penurunan. Ketika suku bunga deposito turun, keinginan masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank akan menurun. Kondisi ini memicu peningkatan jumlah uang beredar yang selanjutnya akan meningkatkan transaksi masyarakat. Pada suku bunga kredit, penurunan suku bunga akan merangsang peningkatan permintaan kredit dari pelaku usaha karena murah biaya modal. Pada kondisi ini maka keadaan ekonomi yang lesu akan segera meningkat. Adanya tambahan likuiditas yang ada di masyarakat untuk bertransaksi akan diimbangi oleh peningkatan produksi di sisi pelaku usaha maka pada akhirnya akan meningkatkan kegiatan ekonomi. (Yodiatmaja, 2012)

Menurut Hudaya (2011), hubungan antara BI rate dengan inflasi adalah kenaikan BI rate akan mendorong kenaikan suku bunga jangka pendek di pasar uang. Demikian juga halnya dengan suku bunga jangka panjang. Produsen akan merespon kenaikan suku bunga di pasar uang dengan mengurangi investasinya, maka produksi dalam negeri (*output*) menurun sehingga tingkat inflasi domestik menurun.

2.2.4 Belanja Pemerintah terhadap Inflasi

Teori ekonomi Keynesian adalah teori ekonomi tentang pengeluaran total dalam perekonomian dan pengaruhnya terhadap output dan inflasi. Teori ini dikembangkan oleh John Maynard Keynes selama tahun 1930-an dalam upaya memahami depresi besar. Keynes menganjurkan untuk meningkatkan pengeluaran pemerintah dan menurunkan pajak untuk merangsang permintaan dan menarik

global keluar dari depresi.



Selanjutnya, teori ini juga digunakan untuk merujuk pada konsep bahwa kinerja ekonomi yang optimal dapat dicapai dan kemerosotan ekonomi dapat dicegah dengan mempengaruhi permintaan agregat melalui intervensi ekonomi oleh pemerintah. Ekonomi Keynesian dianggap sebagai teori “sisi permintaan”.

Belanja pemerintah mempunyai dasar teori yang dapat dilihat dari identitas keseimbangan pendapatan nasional yaitu $Y = C + I + G$ yang merupakan sumber legitimasi pandangan kaum Keynesian akan relevansi campur tangan pemerintah dalam perekonomian.

Dalam perekonomian yang tidak melakukan perdagangan luar negeri, penawaran agregat adalah sama dengan pendapatan nasionalnya (Y), yaitu sama dengan nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian pada suatu periode tertentu. Pengeluaran agregat atau pengeluaran yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam perekonomian tersebut, meliputi tiga jenis perbelanjaan yaitu konsumsi rumah tangga (C), investasi pemerintah (I), dan belanja pemerintah akan barang dan jasa (G). Dari persamaan keseimbangan perekonomian dalam tiga sektor ini dapat ditelaah bahwa kenaikan atau penurunan belanja pemerintah akan menaikkan atau menurunkan pendapatan nasional.

Dalam perekonomian dua sektor, pendapatan nasional adalah sama dengan pendapatan disposabel. Pendapatan disposabel merupakan pendapatan yang digunakan oleh para penerimanya, yaitu semua rumah tangga yang ada dalam perekonomian, untuk membeli barang-barang dan jasa-jasa yang diinginkan. Sebagai akibat adanya pajak, dalam perekonomian tiga sector pendapatan telah menjadi lebih kecil dari pendapatan nasional. Penurunan pendapatan disposable akan mengurangi konsumsi dan pendapatan rumah

Hal ini disebabkan karena pajak yang dibayarkan mengurangi



kemampuannya untuk melakukan pengeluaran konsumsi dan menabung (Sukirno, 2006). Pajak yang lebih tinggi ini akan mengurangi keuntungan dari produsen dan berimbas pada harga. Dampaknya adalah penawaran agregat turun (karena penurunan insentif swasta), sementara permintaan agregat meningkat (karena teknik pembiayaan yang inflasioner) dan pada akhirnya mengakibatkan inflasi.

Teori ekonomi neoklasikal juga dapat menjelaskan hubungan belanja pemerintah dan inflasi dalam jangka panjang. Teori ini memandang bahwa penawaran dan permintaan adalah faktor utama yang menentukan perekonomian, mulai dari barang, harga, hingga pendapatan dalam perekonomian. Ekonom neoklasik menggunakan konsep ekuilibrium dalam menjelaskan berjalannya perekonomian.

Ekonomi neoklasik berpendapat pasar harus bebas dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi. Pemerintah tidak seharusnya mengintervensi karena hanya akan membuat pasar tidak efisien. Pemikir Neoklasik mengakui bahwa ekonomi tidak bisa mencapai keseimbangan secara langsung akan tetapi, kaum Neoklasik lebih tidak setuju ketika harus mengabaikan keberadaan mekanisme pasar serta menyerahkan segalanya kepada pemerintah. Bagi Neoklasik, kelemahan pasar dan ketidaksempurnaan pasar dapat diatasi oleh pemerintah, dan pemerintah harus campur tangan dalam hal ini. Akan tetapi, batasan campur tangan pemerintah dalam hal ekonomi ini hanya sebatas memperbaiki distorsi yang berlangsung di pasar dan bukannya malah menggantikan fungsi mekanisme pasar itu sendiri.

Menurut teori Neoklasik, segala upaya untuk mengintervensi melalui penambahan belanja pemerintah pada akhirnya akan mengakibatkan inflasi.

Berdasarkan teori ini maka dapat dikatakan belanja pemerintah mempunyai

yang positif terhadap inflasi dengan mengasumsikan upah dan harga



Seiring berjalannya waktu, inflasi secara signifikan mengakibatkan pengambilan keputusan pemerintah menjadi rumit. Ketika kebijakan fiskal yang semula sebagai elemen penting dalam mencapai stabilitas harga, ternyata juga dipengaruhi inflasi itu sendiri. Inflasi menaikkan biaya yang harus dikeluarkan pemerintah yang secara simultan dapat menaikkan penerimaan negara, dimana peningkatan fiskal pemerintah memiliki tingkat kecepatan yang berbeda.

2.2.5 Harga Minyak Dunia terhadap Inflasi

Hubungan antara harga minyak dunia terhadap inflasi dapat kita lihat melalui teori yang dikemukakan oleh Blanchard. Menurut Blanchard, mekanisme transmisi dampak *oil price shock* terhadap harga dan inflasi dapat dijelaskan melalui model *mark-up*. Ketika terjadi kenaikan harga minyak dunia maka perusahaan akan merespon dengan menaikkan markup sehingga harga akan naik, karena hubungan antara keduanya berbanding lurus. Dengan asumsi upah tetap, peningkatan harga minyak akan menyebabkan peningkatan biaya produksi dan mendorong perusahaan untuk meningkatkan harga.

Meningkatnya harga minyak menyebabkan meningkatnya inflasi. Harga minyak mentah yang lebih tinggi akan segera diikuti oleh naiknya harga produk-produk minyak, seperti bensin dan minyak bakar yang digunakan konsumen (Cognigni dan Manera, 2008). Karena ada upaya mensubstitusi minyak dengan energi bentuk lain, harga sumber energi alternatif juga akan meningkat. Disamping efek langsung terhadap inflasi, terdapat efek tidak langsung berkaitan dengan

perusahaan dan perilaku pekerja (*second round effect*). Perusahaan akan meningkatkan biaya produksi dalam bentuk harga konsumen yang



lebih tinggi untuk barang-barang atau jasa non-energi, sementara pekerja akan merespon peningkatan biaya hidup dengan menuntut upah yang lebih tinggi.

Tingginya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya akan menyebabkan inflasi. Oleh karena itu, konsumsi minyak yang tinggi diperkirakan akan menyebabkan inflasi. Inflasi ini termasuk *demand pull inflation* yang disebabkan oleh terlalu kuatnya peningkatan *aggregate demand* masyarakat terhadap komoditi-komoditi hasil produksi di pasar barang. Akibatnya, akan menarik (*pull*) kurva permintaan agregat ke arah kanan atas, sehingga terjadi *excess demand*, yang merupakan *inflationary gap*. Dalam konteks makroekonomi, kondisi ini digambarkan oleh output riil yang melebihi output potensialnya atau permintaan total (*aggregate demand*) lebih besar dari pada kapasitas perekonomian. Dalam kasus inflasi jenis ini, kenaikan harga-harga barang biasanya akan selalu diikuti dengan peningkatan output (GNP riil) dengan asumsi bila perekonomian masih belum mencapai kondisi *full-employment*.

Kenaikan harga minyak dunia dapat memicu terjadinya inflasi. Inflasi yang disebabkan oleh adanya kenaikan harga-harga komoditi di luar negeri (di negara asing yang memiliki hubungan perdagangan dengan negara yang bersangkutan) merupakan salah satu jenis inflasi menurut asalnya yaitu *imported inflation*. Inflasi ini hanya dapat terjadi pada negara yang menganut sistem perekonomian terbuka (*open economy system*). Inflasi ini dapat 'menular' baik melalui harga barang-barang impor maupun harga barang-barang ekspor.

Inflasi yang terjadi di suatu negara sangat jarang (jika boleh dikatakan tidak ada) yang disebabkan oleh satu jenis inflasi, tetapi seringkali karena kombinasi dari beberapa jenis inflasi. Hal ini dikarenakan tidak ada faktor-faktor ekonomi maupun selaku ekonomi yang benar-benar memiliki hubungan yang independen atau sistem perekonomian negara. Sebagai contoh, *imported*



inflation seringkali diikuti oleh *cost push inflation*, *domestik inflation* diikuti dengan *demand pull inflation*, dsb.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai hubungan variabel-variabel moneter terhadap inflasi sebelumnya dilakukan oleh Amrini dkk (2014) dengan judul Analisis Kebijakan Moneter terhadap Inflasi dan Perekonomian di Indonesia yang menyatakan bahwa jumlah uang beredar, jumlah uang beredar periode sebelumnya, suku bunga SBI, kurs, dan perekonomian secara bersama – sama berpengaruh signifikan terhadap inflasi di Indonesia. Sementara itu, secara parsial jumlah uang beredar berpengaruh signifikan dan positif terhadap inflasi di Indonesia.

Watulingas dkk (2016) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Aspek Moneter dan Fiskal terhadap Inflasi di Indonesia (Periode Tahun 2000 – 2014) menyatakan bahwa jumlah uang beredar berpengaruh signifikan terhadap perubahan tingkat inflasi di Indonesia, hal ini sesuai dengan teori bahwa jika jumlah uang beredar meningkat maka akan mengakibatkan kenaikan inflasi. Lalu, belanja pemerintah berpengaruh signifikan terhadap perubahan tingkat inflasi di Indonesia, hal ini sesuai dengan teori bahwa jika terjadi peningkatan belanja pemerintah maka akan mengakibatkan kenaikan inflasi. Kemudian pajak berpengaruh signifikan terhadap perubahan tingkat inflasi di Indonesia, hal ini sesuai dengan teori bahwa jika terjadi peningkatan penerimaan pajak ditahun sebelumnya maka akan mengakibatkan penurunan nilai inflasi.

Menurut Agusmianata dkk (2017), dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Jumlah Uang Beredar dan Tingkat Suku Bunga serta Belanja pemerintah terhadap

Indonesia dikatakan bahwa jumlah uang beredar berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi di Indonesia. Pengaruh ini



disebabkan oleh *demand pull inflation*. Permintaan barang terlalu kuat disebabkan oleh pendapatan masyarakat yang meningkat, dengan meningkatnya pendapatan jumlah uang beredarpun terlalu banyak beredar di masyarakat sehingga masyarakat dengan mudahnya untuk berbelanja barang-barang dan permintaan barang-barangpun meningkat dan terjadilah inflasi. Lalu, tingkat suku bunga berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kebijakan moneter cenderung mengikuti pergerakan inflasi. Belanja pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap inflasi di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh pemerintah mengambil kebijakan fiskal berupa tindakan memperkecil belanja pemerintah. Pendapatan disposibel berkurang yang pada gilirannya menyebabkan daya beli masyarakat juga akan berkurang. Keadaan ini menyebabkan harga-harga barang tidak naik lagi sehingga demand pull inflation dapat dikendalikan dan inflasi akan turun.

Deviana (2014) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Pengaruh Suku Bunga SBI, Suku Bunga Kredit dan Nilai Tukar terhadap Inflasi di Indonesia Periode Tahun 2006 – 2012 mengatakan bahwa variabel suku bunga SBI berpengaruh negatif terhadap variabel inflasi, variabel suku bunga kredit berpengaruh positif terhadap inflasi, variabel nilai tukar rupiah berpengaruh negatif terhadap inflasi. Pada uji statistik F menunjukkan bahwa semua variabel independen suku bunga SBI, suku bunga kredit dan nilai tukar secara bersamaan mempengaruhi variabel dependen Inflasi. Pada uji statistik t menunjukkan bahwa variabel suku bunga SBI, suku bunga kredit berpengaruh terhadap inflasi sementara nilai tukar tidak berpengaruh terhadap inflasi.

Sipayung dan Budhi (2013) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh

Nilai Tukar dan Jumlah Uang Beredar terhadap Inflasi di Indonesia Periode

2006 – 2012 menyatakan bahwa variabel Produk Domestik Bruto (PDB), nilai tukar



rupiah terhadap dollar Amerika Serikat dan jumlah uang beredar berpengaruh signifikan secara simultan terhadap tingkat inflasi di Indonesia periode 1993-2012. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa variabel Produk Domestik Bruto (PDB) dan jumlah uang beredar tidak berpengaruh sedangkan nilai tukar secara parsial berpengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat inflasi di Indonesia untuk periode 1993-2012. Variabel nilai tukar diketahui sebagai variabel yang berpengaruh paling dominan terhadap tingkat inflasi di Indonesia periode 1993-2012 jika dibandingkan dengan variabel Produk Domestik Bruto (PDB) dan jumlah uang beredar.

Yuliandari dan Hariyanti (2016) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Indikator Makroekonomi terhadap Tingkat Inflasi di ASEAN-5 menyatakan bahwa berdasarkan uji parsial yang dilakukan, untuk negara Indonesia, variabel JUB berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi, variabel suku bunga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap inflasi, variabel kurs berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap inflasi dan GDP berpengaruh negatif dan signifikan terhadap inflasi. Rangkuman hasil penelitian untuk 5 negara di ASEAN adalah dari semua variabel yang diteliti, hanya variabel suku bunga yang berpengaruh terhadap tingkat inflasi di kelima negara ASEAN. Variabel jumlah uang beredar hanya negara Indonesia saja yang berpengaruh signifikan terhadap inflasi, kurs hanya berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap inflasi di negara Filipina. Dan untuk variabel GDP berpengaruh negatif dan signifikan terhadap inflasi di negara Indonesia dan Philipina.

Mahendra (2016) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Pengaruh Jumlah Uang Beredar, Suku Bunga SBI dan Nilai Tukar terhadap Inflasi di

a mengatakan bahwa berdasarkan hasil uji F dan uji parsial, variabel



jumlah uang beredar, suku bunga SBI, dan nilai tukar tidak berpengaruh secara signifikan dan secara nyata terhadap inflasi.

Utami dan Soebagiyo (2013) juga melakukan penelitian yang berjudul Penentu Inflasi di Indonesia; Jumlah Uang Beredar, Nilai Tukar, ataukah Cadangan Devisa?. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Produk Domestik Bruto, Jumlah Uang Beredar, Nilai Tukar, dan Cadangan Devisa secara serempak mempengaruhi Inflasi di Indonesia pada tahun 2007-2013. Hasil regresi dari penelitian menunjukkan bahwa Jumlah Uang Beredar berpengaruh negatif signifikan terhadap Inflasi di Indonesia, Nilai Tukar berpengaruh positif signifikan terhadap Inflasi di Indonesia. Cadangan devisa tidak berpengaruh signifikan terhadap Inflasi di Indonesia dan Produk Domestik Bruto tidak berpengaruh terhadap tingkat inflasi di Indonesia pada tahun 2007- 2013.

Kalalo dkk (2016) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Inflasi di Indonesia periode 2000-2014 menyatakan bahwa variabel Jumlah Uang Beredar secara nyata tidak berpengaruh terhadap inflasi di Indonesia. Ketika Jumlah Uang Beredar meningkat ternyata tidak serta merta diikuti oleh kenaikan harga-harga barang dan jasa sehingga tidak terlalu mempengaruhi daya beli masyarakat. Hal ini membuat kecenderungan masyarakat lebih suka memegang uang daripada membelanjakannya. Variabel Harga Minyak Dunia tidak berpengaruh terhadap inflasi di Indonesia. Ketika Harga Minyak Dunia naik pemerintah langsung merespons dengan mengeluarkan kebijakan fiskal seperti harga, pendapatan, dan perpajakan guna menjaga inflasi di Indonesia. Variabel Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika tidak berpengaruh terhadap inflasi di Indonesia. Perubahan Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika mampu di

oleh Pemerintah dengan mengucurkan cadangan devisa yang dimiliki menutupi selisih dari biaya perdagangan.



Variabel BI Rate berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi di Indonesia. Dengan tingginya tingkat suku bunga dapat menurunkan sifat konsumtif masyarakat dan lebih memilih untuk menyimpan uangnya di bank sehingga jumlah uang beredar berkurang di masyarakat dan kenaikan harga dapat diatasi.

Rahmawati dan Wahyu (2017) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Pengaruh Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia dan Jumlah Uang Beredar terhadap Tingkat Inflasi di Indonesia Periode 2006.1-2015.1 (Error Correction Model) menyatakan bahwa hanya variabel suku bunga Sertifikat Bank Indonesia yang memiliki pengaruh terhadap tingkat inflasi baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek, sedangkan variabel jumlah uang beredar hanya berpengaruh positif dan signifikan dalam jangka panjang namun tidak berpengaruh dalam jangka pendek.

Halim dkk (2015) melakukan penelitiannya yang berjudul Pengaruh Harga Minyak Mentah Dunia, Harga Emas, JUB, dan Kurs terhadap Inflasi di Indonesia Periode 2001.1-2013.12. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa pengaruh indikator harga minyak mentah dunia terhadap inflasi di Indonesia memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan, hasil tersebut tidak sesuai dengan teori bahwa harga minyak mentah dunia berhubungan positif terhadap inflasi. Harga emas memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan, hal tersebut sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa apabila inflasi naik maka besarnya tingkat pengembalian saham akan menurun begitu pula sebaliknya. Tingkat saham disini berhubungan dengan harga emas. JUB berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap inflasi, hasil tersebut karena nilai uang kuasi yang tidak likuid sehingga walaupun nilainya tinggi tapi tidak cukup untuk mempengaruhi peningkatan inflasi

esia. Kurs berpengaruh negatif dan signifikan terhadap inflasi, hasil mengindikasikan bahwa terjadi penguatan nilai mata uang rupiah sesuai



teori *Purchasing Power Parity* (PPP) yaitu rupiah menguat karena kestabilan atau rendahnya inflasi.

2.3. Kerangka Konseptual

Penelitian ini membahas pengaruh variabel-variabel moneter terhadap tingkat inflasi di Indonesia. Secara umum, inflasi merupakan salah satu masalah ekonomi yang jika mengalami kenaikan dan tidak dapat dikontrol maka akan berdampak buruk bagi perekonomian. Inflasi dijadikan sebagai salah satu indikator penting dalam menjaga stabilitas perekonomian.

Inflasi dapat diakibatkan oleh faktor internal dan eksternal. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengendalikan inflasi dari dalam negeri adalah melalui penerapan kebijakan moneter dan fiskal. Kebijakan moneter dilakukan oleh pihak otoritas moneter, dalam hal ini, Bank Indonesia, untuk mencapai stabilitas harga. Melalui kebijakan ini, inflasi dapat dipengaruhi dari sisi permintaan dan ekspektasi masyarakat melalui beberapa variabel yaitu diantaranya jumlah uang beredar, nilai tukar, dan suku bunga SBI.

Jumlah uang beredar (M2) merupakan salah satu variabel yang menyebabkan inflasi. Perubahan jumlah uang beredar akan mengakibatkan perubahan harga secara proporsional. Artinya kenaikan dalam tingkat pertumbuhan uang satu persen menyebabkan kenaikan satu persen tingkat inflasi.

Nilai tukar juga merupakan salah satu variabel yang menyebabkan inflasi. Apabila nilai tukar melemah akan berakibat pada naiknya harga barang dan jasa. Jika harga barang dan jasa naik secara terus menerus maka akan menyebabkan



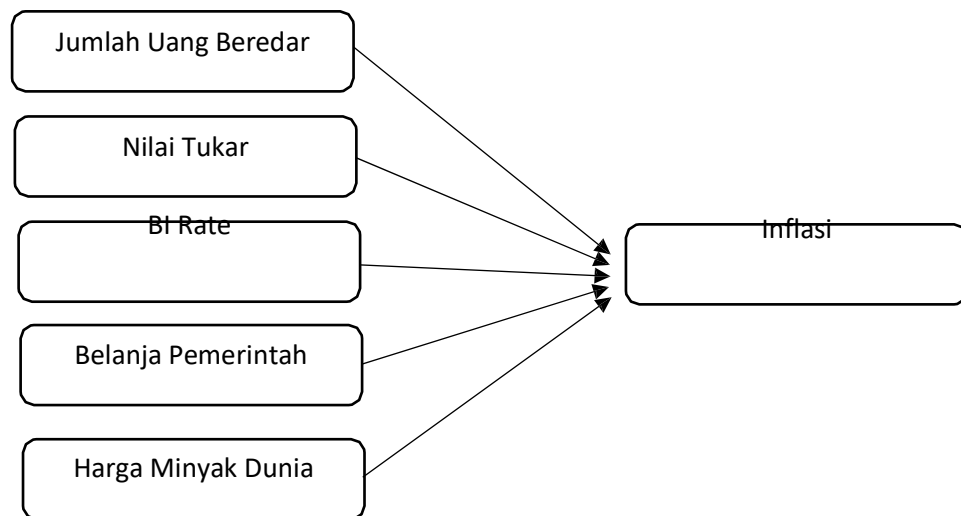
Dalam kerangka kebijakan moneter di Indonesia, BI Rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada masyarakat. BI Rate inilah yang kemudian akan diatur besarnya untuk menjaga inflasi agar tetap stabil dan rendah. Mekanisme bekerjanya BI Rate hingga mempengaruhi tujuan akhir kebijakan moneter yang berupa inflasi disebut sebagai mekanisme kebijakan moneter.

Dari segi variabel fiskal, salah satu yang mempengaruhi inflasi adalah belanja pemerintah. Untuk mengurangi permintaan akan barang dan jasa yang dapat menurunkan harga, pemerintah harus menekan inflasi dengan cara mengurangi pengeluaran.

Harga minyak dunia merupakan salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi inflasi. Jika harga minyak dunia mengalami peningkatan maka harga minyak domestik khususnya negara yang mengimpor minyak akan naik. Sementara itu minyak sangat dibutuhkan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Jika harga minyak naik maka harga barang dan jasa pun akan naik dan akan menyebabkan peningkatan inflasi.

Berdasarkan alur penjelasan di atas, maka dapat digambarkan kerangka konseptual penelitian pada Gambar 2.4 seperti berikut :



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

2.4. Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara terhadap pertanyaan yang diajukan. Berdasarkan teori yang telah dijelaskan pada tinjauan pustaka, maka dapat disusun hipotesis pada penelitian ini adalah :

1. Faktor internal yaitu jumlah uang beredar, nilai tukar, belanja pemerintah serta faktor eksternal yaitu harga minyak dunia berpengaruh positif terhadap inflasi di Indonesia periode tahun 2005-2018.
2. Faktor internal yaitu BI Rate berpengaruh negatif terhadap inflasi di Indonesia periode tahun 2005-2018.

